

RINGKASAN

Hasanah Putri
247410101062

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TERHADAP PERLINDUNGAN EKOSISTEM LAUT YANG TERCEMAR AKIBAT PEMBUANGAN SAMPAH DI GAMPONG PUSONG BARU KOTA LHOKSEUMAWE

(Prof. Dr. Malahayati, S.H., LL.M., dan Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M)

Indonesia mengalami permasalahan lingkungan yang disikapi dengan rasa tidak peduli terhadap efek dan dampak salah satunya pencemaran laut. Dilihat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengartikan kesejahteraan dalam arti luas, yang mencakup pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, perumahan, pendidikan, kesehatan dan energi, serta lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Bagaimana optimalisasi tanggung jawab Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui pendekatan kolaboratif (pemerintah, swasta, masyarakat) dalam penanganan sampah laut dan Untuk menganalisis **bagaimana efektivitas program pemerintah dalam mencegah dan menangani pencemaran laut** di Gampong Pusong Baru Kota Lhokseumawe.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis Empiris yang bersifat preskriptif dengan pendekatan Sosiologis dan pendekatan kasus. Teknik Pengumpulan Data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi secara langsung, melakukan wawancara pada pihak terkait dan melakukan studi dokumentasi yang sudah di peroleh dari fakta dilapangan secara luas serta dibutuhkan.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi tanggung jawab pemerintah dalam penanganan sampah laut memerlukan penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penegakan hukum lingkungan yang tegas, serta penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai agar tercipta lingkungan pesisir yang bersih, sehat, berkelanjutan dan Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe telah melaksanakan berbagai program, seperti kegiatan gotong royong, sosialisasi kebersihan lingkungan, pengangkutan sampah, serta pengawasan terhadap pencemaran pesisir. Saran untuk Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang lebih efektif antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe, pemerintah gampong, aparat penegak hukum, pihak swasta, dan masyarakat dalam penanganan sampah laut agar program yang dilaksanakan berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pemerintah, Ekosistem Laut, Sampah.

SUMMARY

Hasanah Putri
247410101062

**LHOKSEUMAWE CITY GOVERNMENT'S
RESPONSIBILITY FOR THE PROTECTION OF MARINE
ECOSYSTEMS POLLUTED DUE TO GARBAGE DISPOSAL
IN GAMPONG PUSONG BARU, LHOKSEUMAWE CITY**

**(Prof. Dr. Malahayati, S.H., LL.M., dan Dr. Muhammad
Nasir, S.H., LL.M)**

Indonesia faces environmental issues—such as marine pollution—that are often met with indifference regarding their consequences and impacts. The Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia defines welfare in a broad sense, encompassing the fulfillment of needs for food, clothing, shelter, housing, education, healthcare, and energy, as well as access to a good and healthy environment. This study aims to analyze how the Lhokseumawe City Government can optimize its responsibility for managing marine debris through a collaborative approach involving the government, the private sector, and the community, and to evaluate the effectiveness of government programs in preventing and addressing marine pollution in Gampong Pusong Baru, Lhokseumawe City.

The research employs a prescriptive empirical-juridical method, utilizing both sociological and case-based approaches. Data collection techniques include direct observation, interviews with relevant parties, and the study of documentation—drawing upon extensive field-derived facts as required.

The study concludes that optimizing the government's responsibility for managing marine debris requires strengthened stakeholder collaboration, increased public legal awareness, strict enforcement of environmental laws, and the provision of adequate waste management facilities to ensure a clean, healthy, and sustainable coastal environment. The Lhokseumawe City Government, through its Environmental Agency, has already implemented various programs—such as community cleanup drives, environmental hygiene awareness campaigns, waste collection services, and monitoring of coastal pollution. It is recommended that the Lhokseumawe City Government enhance coordination and cooperation among the Environmental Agency, village administrations, law enforcement agencies, the private sector, and the community regarding marine debris management, ensuring that implemented programs operate in an integrated and sustainable manner.

Keywords: Government Responsibility, Marine Ecosystem, Waste.